

TRANSFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH*

Oleh : H. Soendoro

ABSTRACT

To enhance public service in creating good and clean government , bureaucracy should improve itself by doing self introspection. Therefore the discipline, moral and religiocity of the bureaucrats should be enhanced. This effort should be started from the high level officials. Besides, we have also to realize the importance of business group existence and role in the economic structure. Therefore, its development should be integrated and sustainable. All elements such as business, local government, legislative, intellectual, bank, related institutions and security have to share same perception in creating just and welfare society with broad nationality for the sake of the next Indonesian generation.

Keywords: *bureaucracy transformation, public service, professionalism, business.*

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia berjalan cukup lama sejak Juli 1997 sampai sekarang, bahkan kali ini sudah berkembang menjadi krisis multi dimensi, krisis Iman, Moral, dan Taqwa diperkirakan akan cukup lama paling tidak 10 tahun. Bagaimana sikap pengusaha dan aparat pemerintah di dalam mengantisipasi situasi seperti ini. Yang menjadi permasalahan adalah sebelum kita membahas hal tersebut perlu kita *flash back* dengan situasi reformasi sejak 1999 dan sejak diberlakukannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2000 tentang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan untuk me-

ngatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari batasan di atas nampak jelas bahwa keputusan-keputusan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah telah bergeser dari dominan sentralistik menuju desentralistis.

Desentralisasi kewenangan untuk melakukan keputusan yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat setempat merupakan "Sumber daya kelembagaan" yang teramat penting dalam mewujudkan demokrasi pembangunan yaitu: dari

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Bidang/sector yang tidak menjadi kewenangan daerah meliputi : (1) Bidang luar negeri; (2) Pertahanan keamanan; (3) Peradilan; (4) Moneter dan Fiskal; (5) Agama; dan (6) Kewenangan lain meliputi;

- a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro,
- b. Dana perimbangan keuangan,
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara,
- d. Pembinaan dan pemberdayaan manusia,
- e. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,
- f. Konservasi,
- g. Standarisasi nasional.

Dalam rangka pengembangan dunia usaha, dari sudut pandang mikro ekonomi, menunjukkan adanya kewenangan penuh pada otonomi daerah untuk menentukan strategi, arah, dan kebijakan pengembangan usaha (bisnis) di daerah. Oleh karena itu otonomi daerah dapat lebih mempertegas upaya daerah dalam rangka mewujudkan adanya *absolute advantage*, yang diikuti dengan *comparative advantage* dan melalui prinsip efisiensi mewujudkan *Competitive Advantage* daerah baik pada tingkat regional, nasional, maupun pada tingkat global. Dengan demikian otonomi daerah dalam rangka pengembangan

bisnis di daerah dapat merupakan peluang tetapi sekaligus juga menjadi tantangan. Menjadi peluang apabila birokrasi pemerintah dalam suasana otonomi daerah benar-benar mampu dan mau menempatkan dunia bisnis sebagai *prime mover* bagi kemajuan pembangunan daerah. Dengan otonomi daerah sudah seharusnya munculnya kemauan politik (*political will*) untuk menempatkan pengembangan bisnis sebagai konsep untuk pembangunan daerah. Jadi pengembangan bisnis tidak hanya sekedar menjadi salah satu fungsi pembangunan daerah sebagaimana selama ini dipraktekkan. Sebagai konsep pembangunan daerah karena bisnis (dunia usaha) merupakan kristalisasi dari seluruh pendekatan pembangunan daerah. Dengan konsep pembangunan bisnis dapat dipastikan berdampak kemajuan bagi sektor-sektor lainnya. Pengembangan bisnis berarti investasi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekspor, dan terjadinya transformasi sosial.

Otonomi daerah hanya akan menjadi peluang apabila birokrasi Pemerintah dan Legislatif memiliki kemampuan profesional dan komitmen tinggi terhadap implementasi otonomi daerah yang bertumpu pada peningkatan biro pemerintah dan dunia usaha. Kenyataan membuktikan bahwa UKM/IKM ternyata lebih tangguh

dalam menghadapi krisis moneter. Fundamental ekonomi Indonesia ternyata harus berpulang kepada pertanian dan perkebunan dalam arti luas. Ternyata usaha kecil dan menengah menjadi wahana yang baik dalam skala bisnis dimasa mendatang, karenanya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sektor industri dengan prinsip *Small is Beautiful* akan menjadi dambaan banyak pengusaha saat ini bahkan di negara-negara adi kuasa seperti USA, EROPA, dan Jepang sudah menjadi trend usaha;
2. Sektor industri yang mengarah kepada bisnis hulu akan lebih tahan terhadap krisis karena selalu dibutuhkan;

Namun ada beberapa hal yang patut kita waspadai dengan banyaknya tantangan di era baru milenium ekonomi, antara lain :

- a. Praktek harga murah atas produk-produk dari negara China, negara ini sudah menjalankan politik yang disebut *Residual Trading* yaitu obral besar/harga murah dengan *dumping* sistem.
- b. Indonesia dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan pasar bagi negara lain (ASEAN/Asia/USA/EROPA, dan lain-lain).
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) kita yang besar tetapi dengan tingkat intelektual yang relatif rendah dibanding negara

tetangga, sehingga masalah efisiensi dan profesional kita tertinggal.

- d. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah perlu dieksplorasi dengan *hihgt technology* juga dengan padat modal yang masih menjadi kendala bagi bangsa Indonesia.
- e. Daya saing produk Indonesia yang rendah.
- f. Tehnologi dan informasi menjadi basis penentu dalam perebutan pasar.
- g. Indonesia berfungsi sebagai penstabil keamanan di ASEAN, tetapi saat ini menjadi sumber instabilitas.
- h. Otonomi daerah merupakan peluang sekaligus tantangan kesejahteraan rakyat.

B. PEMBAHASAN

Pertanyaan besar sekarang ini adalah kesiapan perbankan dalam menggerakkan sektor industri. Bukan rahasia lagi bahwa bank swasta maupun pemerintah hampir dapat dikatakan *75 % collapse*. Padahal usaha tanpa modal sangatlah sulit. Kemacetan sistem keuangan ternyata merupakan kunci permasalahan macetnya perkembangan investasi nasional khususnya untuk industri menengah besar. Sektor ekonomi yang sampai saat ini masih menjadi korban sistem perekonomian yang rusak adalah perdagangan barang impor. Sektor ini akan selalu menjadi bulan bulanan kurs US\$ baik pada waktu

membuka L/C maupun semua ongkos-ongkos pelabuhan. Momentum kesulitan moneter harus dimanfaatkan oleh para investor baru, karena mereka belum kena dampak kemudahan-kemudahan/*mark up* dan lain-lain yang mempunyai kans untuk memulai kredit baru. Tetapi hendaknya pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin kredit yang dapat turut membantu kesulitan agunan bagi UKM/IKM. Dalam momentum semacam ini kesempatan Pemda untuk mendorong peran serta aktif BPD.

Telah kita maklumi bersama umumnya UKM/IKM dalam pengembangannya ke arah ekspor masih banyak kendala antara lain :

1. Kegiatan bisnis internasional Indonesia masih berada pada tahapan elementer, yaitu bahan baku atau bahan masih setengah jadi sehingga belum sepenuhnya memasuki ekspor;
2. Faktor bahasa dengan segala akibatnya termasuk kesulitan berkomunikasi dalam bahasa bisnis;
3. Faktor pasar dan tata cara berbisnis internasional masih kurang.

Untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1999-2004 Bidang Ekonomi yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat dengan visi terwujudnya industri *manufacturing* yang tangguh dan berdaya saing serta bertumpu pada sumber daya masing-masing

daerah/wilayah ekonomi dan perdagangan barang dan jasa yang tertib dan transparan berdasarkan mekanisme pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Sebagai salah satu fokus sasaran maka kebijaksanaan dalam pengembangan usaha kecil menengah diarahkan kepada pemberdayaan yang mencakup :

1. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku lokal bagi produk industri serta yang memperdagangkan produksi dalam negeri baik berorientasi lokal maupun ekspor;
2. Memberikan peluang yang lebih besar kepada lembaga profesional untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan UKM/IKM;
3. Menyediakan fasilitas permodalan, mendorong usaha baru, memperluas jaringan pasar; dan
4. Mengembangkan komoditi unggulan sesuai potensi wilayahnya serta pengembangan UKM/IKM dengan pola kemitraan terutama yang berorientasi ekspor sehingga UKM/IKM mampu menciptakan devisa untuk mempercepat usahanya.

Untuk mendukung pengusaha kecil/menengah di propinsi maka perlu implementasi kebijakan pemerintah sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;

2. Bantuan perkreditan pada komoditi industri unggulan yang berbasis pada sumber daya alam;
3. Meningkatkan jumlah dan persebaran IKM yang memiliki daya saing tinggi dan efisien, serta produktivitas dan mutu yang tinggi;
4. Pemberdayaan industri kecil pedesaan;
5. Pengembangan pola kemitraan usaha industri kecil;
6. Penanganan usaha ekonomi desa dan pendidikan serta ketrampilan termasuk pemberdayaan potensi masyarakat;
7. Focus pembinaan UKM/IKM agar mampu berperan dalam ketahanan ekonomi pada era otonomi daerah dan globalisasi yang mampu berorientasi ekspor yaitu;
 - a. Pendekatan komoditi dengan memperhatikan dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mempunyai keterkaitan yang luas terhadap industri hulu dan hilirnya,
 - b. Menetapkan pola/model pembinaan, berdasarkan geografis wilayah kabupaten /kota untuk mengembangkan komoditi unggulan yang mencakup dari bahan baku hingga pemasaran termasuk lembaga pendukungnya,
 - c. Pembinaan pertumbuhan wira usaha baru dengan upaya memadukan tenaga

ahli akademis bakar/keturunan berbisnis (otodidak), instansi terkait sebagai pembina, mitra kerja senior yang sudah berhasil sebagai pola kemitraan.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan pemerintah Indonesia umumnya dan Jawa Tengah khususnya akan memperoleh manfaat ganda yaitu terjadi peningkatan UKM dan penyerapan tenaga kerja.

Aparat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah apabila akan meningkatkan pelayanan publik dan profesionalisme maka perlu menyusun suatu kebijakan publik yang memperhatikan kelebihan dan kelemahan Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Kelebihan Jawa Tengah
 - a. Kegiatan pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan internasional dan menduduki rangking ke-3 seluruh Indonesia setelah Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
 - b. Harga tanah dan upah buruh lebih rendah dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur.
 - c. Sumber *resources* diatas tanah maupun dibawah tanah sangat prospektif.
 - d. Faktor kegunaan berusaha dan keamanan cukup kondusif.
 - e. Jawa Tengah khususnya Semarang merupakan tempat yang paling baik di seluruh Indonesia untuk

- investasi/penilaian dari lembaga yang dibentuk oleh Kadin dan Pemerintah.
2. Namun sayang dibanding dengan negara tetangga kita apalagi dibanding Vietnam dan China kita masih punya kelemahan-kelemahan antara lain :
 - a. Tidak adanya *Tax Holiday*;
 - b. Perijinan masih birokratis;
 - c. Pungutan ada dimana-mana;
 - d. Tidak adanya kepastian hukum;
 - e. Tidak ada jaminan kelangsungan bahan baku;
 - f. Masih adanya penjarahan-penjarahan;
 - g. Bunga bank sampai 17 % dibanding negara tetangga hanya 4 % bahkan Jepang hanya 0,68 % per Tahun;
 - h. Kurang profesionalnya aparat pemerintah sehingga mempersulit pelayanan publik. Walaupun Semarang, Sragen, dan Banjarnegara telah berusaha dengan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) tapi faktanya belum optimal;
 - i. Sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air, dan telepon masih perlu ditingkatkan;
 - j. Informasi *Trade, Tourism* dan investasi, baik berupa brosur-brosur maupun *online* masih minim, perlu penggalakkan promosi baik dalam maupun luar negeri;
 - k. UMR (Upah Minimal Regional) yang tidak sama di masing-masing kota/kabupaten;
 - l. Akibat negatif dari target PAD (Penghasilan Asli Daerah) yang diterapkan oleh Pemkot/Pemkab/Propinsi banyak sekali peraturan-peraturan daerah, retribusi, dan pungutan-pungutan yang sangat memberatkan pengusaha seperti pajak penerangan jalan, IMB, PBB, Pajak Kepemilikan Genset, Tarif parkir, Tarif STNK, dan lain-lain.

C. PENUTUP

1. Birokrat perlu segera membenahan dan introspeksi untuk meningkatkan pelayanan publik.
2. Disiplin, Imam, Moral, dan Taqwa dari semua lini perlu peningkatan dan ini sebaiknya dimulai dari pejabat-pejabatnya.
3. Pemerintah perlu menyadari pentingnya eksistensi dan peran kelompok usaha dalam struktur perekonomian maka pengembangannya perlu dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan (duduk satu meja dengan melibatkan semua unsur Pengusaha, Pemda, Legislatif, Intelektual, Perbankan, Instansi terkait, dan Pengendali keamanan) semuanya itu harus mempunyai persepsi yang sama

- mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dengan wawasan kebangsaan yang luas demi generasi bangsa Indonesia.
4. Menciptakan *Good and Clean Government* antara Pemerintah Daerah, dan Legislatif.
 5. Sumber daya manusia Indonesia melimpah tapi tidak profesional, kurang terampil dan tidak siap pakai, oleh karena itu Pemerintah dan semua yang terlibat bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu SDM.
 6. Maksud dan tujuan dari otonomi daerah harus benar-benar konsisten dilaksanakan tanpa adanya penyimpangan yang sangat “kebablasan” sehingga menimbulkan efek-efek negatif.
 7. Penempatan, seleksi, rekrutmen, dan pelatihan-pelatihan kepada birokrat/aparat pemerintah harus dilaksanakan secara efektif dan profesional dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli yang handal serta sesuai dengan kemampuannya.
- How Do Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Reading, MA : Addison-Wesley.
- Sampara, Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- , Lukman. & Sutopo. 2001. *Pelayanan Prima*. Jakarta : Lembaga Administrasi Publik RI.
- * Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Administrasi Negara Transformasi Birokrasi Pelayanan Publik & Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Yang Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara FISIP, Universitas Diponegoro Semarang, 12 April 2004

DAFTAR PUSTAKA

Kingsely, Gordon. 1997. Reflecting on Reform and the Scope of Public Administration. *Public Administration Review*. Vol. 7, No. 2. March/April.

Osborn, David. & Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government*: